



TRIBUN/IST

SERAHKAN PIALA- Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan anggota Forum Pimpinan Komunikasi Daerah (FKPD) Kota Batam menyerahkan kepada Camat Batam Kota, M Fairus Ramadhan, Senin, (23/4) di Lapangan Gladi Bakar Jaya, Tanjung Riau.

Kita Harus Unggul dari Segi Agama

▶ Batam Kota Juara Umum MTQ Tingkat Kota

BATAM, TRIBUN - Kecamatan Batam Kota berhasil meraih juara umum pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Batam ke XXIX Tahun 2018. Mereka juara berdasarkan Keputusan Dewan Hakim yang dibacakan dalam acara penutupan itu. Sedangkan peringkat ke II diraih Kecamatan Batuampar, dan

peringkat ke III diraih Kecamatan Sei Beduk.

Sementara Harapan IV diraih Kecamatan Sekupang. Secara langsung Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan anggota Forum Pimpinan Komunikasi Daerah (FKPD) Kota Batam menyerahkan

kepada Camat Batam Kota, M Fairus Ramadhan, Senin (23/4) di Lapangan Gladi Bakar Jaya, Tanjung Riau. Surat Keputusan pemenang lomba dibacakan oleh Ketua Dewan Hakim, Sarbaini bersama Sekretaris Dewan Hakim, Asril Arif.

● ke halaman 19

Kita Harus

Lomba Rabbana dimenangkan Kecamatan Sei Beduk sebagai juara I, juara II Kecamatan Batuampar, Juara III dimenangkan Kecamatan Sekupang dan harapan I dimenangkan oleh Kecamatan Batuaji. Untuk lomba stan bazar PKK sebagai juara I Kecamatan Lubuk Baja, juara II Kecamatan Batuaji, juara III diraih Kecamatan Batuampar dan harapan I diraih Kecamatan Sagulung. Adapun yang menjadi penilaian adalah bidang produk, bidang dekorasi dan bidang kebersihan. Hadiah diserahkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam, Marlin Agustina Rudi kepada Ibu Tim Penggerak PKK Kecamatan.

Acara penutupan MTQ diawali dengan pembacaan Al-Qur'an oleh qoriah Zulaika Rahma Aulia juara satu MTQ tingkat nasional Tilawah. Zulaika merupakan juara 1 MTQ Tingkat Internasional pada Tahun 2017 di Iran. Rahmah Aulia merupakan juara 1 MTQ Tingkat Nasional Bidang Tilawah anak.

Sekretaris Daerah Kota Batam selaku Ketua Panitia

MTQ Tingkat Kota Batam, Jefridin dalam sambutannya mengatakannya dari tahun ke tahun kualitas dan kuantitas peserta MTQ meningkat. Dari segi kuantitas jumlah meningkat dari tahun ke tahun tahun ini berjumlah 528 kafilah. Kegiatan MTQ juga dimeriahkan dengan lomba rabbana dan bazar tingkat Kota Batam. Peningkatan kualitas qori dan qoriah, hafiz dan hafizah atas peran guru agama yang ada di Kota Batam.

Jefridin juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kota Batam yang telah menyukseskan terselenggaranya MTQ tingkat Kota Batam dari awal hingga selesai MTQ. Adapun tempat diselenggarakannya lomba MTQ, Astaka Utama (Golongan Tartil, Anak2, Remaja, Dewasa, Qira'at Saba', Cagnet, Qasidah Rebana), Aula Qur'an Centre (Golongan. 1 Juz dan Tilawah, 5 Juz), Masjid Jami' Nurul Huda (Golongan 10 Juz, 20 Juz, 30 Juz dan Tafsir Al-Qur'an), Aula Dinas Pendidikan (Cabang Fahmil Qur'an), SDN

001 Tanjung Riau (Cabang Syarhil Qur'an), Ruang Kelas SDN 001 Tanjung Riau (Cabang Khath Al-Qur'an) dan Aula Kemenag Kota Batam (Cabang M2IQ).

Tidak kalah dengan acara pembukaan MTQ pada 18 April lalu, masyarakat Kota Batam pun tumpah ruah memadati lapangan Gladi Bakar Jaya Tanjung Riau untuk menyaksikan malam penutupan MTQ Tingkat Kota Batam. Warga dihibur dengan penampilan Zikir Barat dan Dendang Melayu Tanjung Riau.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh masyarakat dan atas nama Pemko Batam juga menyampaikan terimakasih kepada masyarakat Tanjung Riau karena Pemko telah menggunakan lapangan bola Tanjung Riau untuk MTQ. Ia mengatakan semua untuk meningkatkan ekonomi dan harkat martabat masyarakat Tanjung Riau.

"Terimakasih kepada qori dan qoriah, MTQ provinsi akan dilaksanakan dan

kembali perjuangkan juara umum untuk kedua kalinya. Langsung TC selesai ini ya Pak Erizal, sehingga pada 2020 piala menjadi milik kita," ucap Wako didampingi Wakil Wali Kota Batam, Am-sakar Achmad, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Zainal Abidin dan Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Iman.

Batam akan memiliki tiga masjid besar, ajaran agama jangan sampai lupa karena Pemko Batam akan membangun destinasi wisata. Wako ingin ke depan Batam tidak hanya unggul dalam sektor industri dan wisata tetapi juga dari segi agama. Dengan demikian budaya luar tidak mempengaruhi masyarakat Batam. Dengan selesainya Masjid Agung Sultan Abdurrahmansyah maka penyelenggaraan MTQ ke depan akan dilaksanakan di Masjid Agung. Pemko juga akan melakukan pemugaran Masjid Raya Batam Centre.

Turut hadir dalam acara penutupan Ketua Kemenag Kota Batam, Erizal Abdullah, Ketua MUI Kota Batam, Usman Ahmad dan Anggota LAM Kota Batam. (* /hat)

Anggota Dewan Kompak Jalan-jalan

- ▶ Komisi I-IV Kunker Keluar Kota
- ▶ Nuryanto akan Cek ke Banmus

BATAM, TRIBUN - Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tampak lengang, Senin (23/4). Tak seperti biasanya diawal minggu. Kali ini mereka kompak keluar kota untuk melakukan kunjungan kerja. Hal seperti ini pernah terjadi di zaman kepemimpinan Surya Sardi. Kala itu semua anggota dewan kompak kunker dan ada warga yang sudah janji dengan anggota dewan terpaksa balik kanan karena dewan yang ditemui tidak ada di tempat.

Sejak kejadian itu dimasa kepemimpinan Nuryanto dibuat kesepakatan bahwa anggota dewan tidak boleh kunker bersama dalam waktu yang bersamaan. Namun kesepakatan itu diabaikan. Pada Senin (23/4), semua anggota dewan kompak kunker.

Pantauan Tribun setiap komisi terlihat lengang dan kosong, seluruh anggota dewan sedang melakukan Kunjungan

Anggota Dewan

Kerja (Kunker) keluar kota. Setiap komisi berkunjung ke wilayah yang berbeda-beda dengan pembahasan topik yang berbeda pula.

"Dewannya tak ada mba, lagi kunker ke Medan dan Jakarta," ujar salah satu staf Komisi IV DPRD Kota Batam yang tak ingin disebutkan namanya.

Berdasarkan surat kunkernya, Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat dan SDM melangsungkan kunjungan ke Jakarta membahas kota layak pemuda dan ke Medan membahas terkait ketenagakerjaan.

Sementara itu anggota Ko-

misi II Bidang Ekonomi dan Industri sedang melakukan kunker ke Bintan. Membahas strategi pemerintah Kabupaten Bintan dalam meningkatkan pendapatan dan sektor pariwisata.

Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan melakukan kunker ke Jakarta, Bekasi, dan Denpasar. Kunjungan ini membahas perihal perizinan pariwisata.

"Pembahasannya terkait perizinan pariwisata," ujar staf Komisi I, Anton.

Sementara ruang suasana Komisi III Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Lingkungan Hidup

tampak sepi. Tak satupun ada staf yang berada di ruangan pukul 10.00 WIB.

Beberapa anggota dewan yang dihubungi tidak mau mengganggu teleponnya.

Sejumlah staf DPRD yang ditanyakan mengaku sepi kantor dewan karena semua anggota dewan melakukan kunjungan kerja.

Perihal seluruh anggota komisi I, II, III dan IV melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) keluar kota secara serentak, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengaku tidak membenarkan hal tersebut. Seharusnya maksimal dua komisi saja sekali be-

rangkat bersamaan.

"Seharusnya tak boleh. Dan sebenarnya sudah kesepakatan bersama di Banmus dua komisi," ujar Nuryanto kepada Tribun.

Kalau ada kunjungan tidak boleh kosong. Karena kalau pergi semua jadinya kantor kosong. Nuryanto akan mengecek kembali ke Banmusnya seperti apa.

"Apabila ada tamu atau masyarakat yang mengadu bagaimana. Tapi nanti saya cek dulu Banmusnya itu seperti apa. Mungkin untuk penyusunan jadwal di Bamusnya," katanya. **(rus/hat)**

Siswa Tetap Double Shift

► Ruang Kelas Belum Mencukupi ► Dewan Panggil Dinas Pendidikan

BATAM, TRIBUN - Dinas Pendidikan (Disdik) Batam menganggarkan pembangunan ruang kelas baru untuk SD dan SMP. Namun, persoalan double shift belum bisa teratasi.

Kepala Disdik Batam Muslim Bidin juga belum yakin double shift teratasi. Menurut dia, jumlah siswa yang mendaftar mengalami peningkatan.

"Jadi untuk masalah double shift itu

pasti masih ada," kata Muslim kepada *Tribun*, Senin (23/4).

Mengenai pembangunan ruang kelas baru, Muslim mengungkapkan untuk SMP sudah mulai dikerjakan. Namun untuk SD masih tahap perencanaan.

Ia juga menepis anggapan jika pembangunan ruang kelas tersedat karena pembayaran tunda salur.

"Pembangunan RKB (ruang kelas

baru) di SMP dan SD ini kita menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kalau yang SMP rata-rata hampir sudah mulai semua dan sedang dalam proses pengerjaan," katanya.

Lambatnya pembangunan RKB SD dikarenakan masih tahap perencanaan. "Perencanaan ini contohnya adalah di mana kita bikin desain RKB. Setelah itu, rekonstruksinya dan menghitung

dananya. Nah ini yang baru selesai untuk RKB di SD," kata Muslim.

Dia juga mengungkapkan, walaupun Disdik melakukan penambahan ruang kelas baru, siswa baru masih tetap belum tertampung.

Penerimaan siswa baru tidak akan ada masalah jika siswa bisa terbagi

● ke halaman 7

newsanalysis

SUDIRMAN DIANTO

Ketua Dewan Pendidikan Batam

Terapkan Sistem Zonasi

SAYA rasa penerimaan siswa baru tahun ini akan lebih baik dari tahun lalu.

Dinas Pendidikan (Disdik) Batam menerapkan sistem zonasi dengan model yang sama pandangnya dengan Dewan Pendidikan.

Kenapa saya katakan tahun ini lebih baik, karena kami mendapatkan informasi bahwa tahun ini banyak RKB (ruang kelas baru) yang dibangun.

Mudahan-mudahan nanti mampu memberikan jawaban untuk kebutuhan masyarakat.

Kami ingin kepala sekolah memprioritaskan siswa di

● ke halaman 7



Pihak sekolah bersama komite meminta bantuan ke wali murid agar sukarela meminjamkan laptop mereka agar anak-anak bisa melaksanakan UNBK

EFRINA

Kepala SMPN 53 Batam

Ujian Terpaksa Pinjam Laptop

TERGANGGUNYA program-program Dinas Pendidikan (Disdik) diakui oleh sejumlah sekolah. Hal itu kian terasa ketika jadwal ujian akhir tahun tiba.

Salah satunya dialami SMPN 53 Batam di Batuaji. Selain masalah minim pembangunan RKB (ruang kelas baru), pemenuhan fasilitas penunjang untuk siswa pun juga terkendala.

Betapa tidak, sekolah negeri tersebut belum memiliki fasilitas komputer sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Namun pihak sekolah bersama komite berusaha untuk bekerja sama dengan orangtua untuk

meminjamkan laptop agar siswa bisa melaksanakan UNBK.

"Pihak sekolah bersama komite meminta bantuan ke wali murid agar sukarela meminjamkan laptop mereka agar anak-anak bisa melaksanakan UNBK," kata Efrina, Kepala SMPN 53.

Selain dari orangtua pihak sekolah juga meminjam laptop milik guru untuk digunakan selama pelaksanaan ujian.

"Jadi saat ini kita menggunakan sebanyak 70 laptop, untuk UNBK," kata Efrina.

Dia berharap ke depan sekolah mereka mendapat perhatian dari pemerintah. Sehingga tahun depan tidak perlu lagi meminjam laptop untuk ujian. (ian)



SOERYA KUNJUN DI TAHA

Tokoh masyarakat ono mengunjungi dari lima orang te goyangan erotis c Batam Centre. K (23/4) untuk me moral kepada Al terkena musiba

Ketika Rupiah Keok Terparah Sejak 2015

Siswa Tetap

masuk sekolah negeri dan swasta.

Tahun ini, pihaknya juga akan menerapkan sistem zonasi. Penetapan zonasi sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.

"Nah kadang kan satu sekolah itu, sekian RW begitu dan inilah perlu kita tata kembali,"katanya.

Untuk RKB tingkat SMP yang sudah proses pembangunan di beberapa sekolah kurang lebih 30 unit. Sedangkan SD juga ada sekitar 30 lebih unit.

Target pembangunan dilakukan awal April kemarin. Diharapkan, RKB bisa rampung pada Juni atau Juli 2018 mendatang sehingga ruangb baru tersebut bisa digunakan saat penerimaan

siswa baru.

Dengar pendapat

Di pihak lain, DPRD Batam merencanakan memanggil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), terkait masih terhambatnya realisasi program di dinas-dinas, termasuk alasan yang dikemukakan Disdik.

Salah satunya menyangkut tersendatnya pembangunan RKB yang telah direncanakan dan dianggarkan.

Anggota Komisi IV DPRD Batam, Ricky Indrikari mengakui adanya alasan tunda salur yang mengganjal itu. Namun ia berharap dengan rapat dengar pendapat, maka akan ada solusi.

"Memang karena adanya tunda bayar di tahun lalu, makanya RKB tidak berjalan

sesuai rencana sampai triwulan pertama ini. Nah kami panggil dan bahas ini, pada Kamis mendatang. Kami akan bahas di rapat engan BPKAD," ujarnya.

Dikatakan riky, sebenarnya persoalan ini terjadi hampir di seluruh dinas. Jadi bukan hanya Disdik.

Riky juga mengatakan soal RKB ini setiap tahun kerap terjadi. Namun, tahun-tahun sebelumnya bukan karena tidak ada anggaran, RKB tetap dibangun setelah PPDB (penerimaan peserta didik baru) selesai.

"Kalau sekarang diberikan alasan soal tunda bayar, kami maklum. Tapi tahun-tahun sebelumnya kan tidak ada tunda bayar. RKB tetap saja molor," ujarnya.

Sambungan Hal.1

Riky mengakui selama dua periode menjadi anggota dewan, RKB belum pernah dibangun sebelum PPDB, pasti setelahnya. Tepatnya pada Mei atau Juni. Padahal RKB sebenarnya pekerjaan sederhana.

Ditambah lagi, lanjut dia, rencana Disdik mengubah ketentuan sistem rayon menjadi sistem zonasi (regulasi baru) sehingga berpotensi terjadinya pungutan kepada orangtua calon siswa baru.

Alasannya, perlu membangun kelas baru untuk mengatasi membeludaknya siswa baru.

"Sekaligus ini akan berpotensi menimbulkan double budgeting dalam pembiayaan RKB di sekolah," ujarnya. (als/rus)

Sambungan Hal.1

Terapkan Sistem

sekitar sekolah baru kemudian dari luar. Sehingga yang masuk zonasi tercukupi dan dari luar zonasi juga diberi kesempatan.

Disdik berusaha untuk menghadirkan partisipasi masyarakat, baik dunia usaha, industri, maupun umum. Diharapkan bisa ikut berkontribusi meringankan beban pemerintah, khususnya mencukupi kebutuhan RKB.

Ke depan Dewan Pendidikan akan menggalang kekuatan masyarakat untuk sama-sama peduli dengan dunia pendidikan.

Upaya yang dilakukan un-

tuk melahirkan bantuan-bantuan seperti ruang kelas belajar. Supaya, permasalahan yang ada tidak hanya mengandalkan pemerintah.

Karena memang tanggungjawab pendidikan dalam Undang Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 4 pasal 8 dan 9, ada hak dan kewajiban masyarakat.

Masyarakat punya hak mendapatkan pendidikan yang baik, tetapi juga berkewajiban untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Tapi ini tentu akan kita ke-
mas dalam satu formula ber-

basis media. Artinya kalau ada masyarakat yang menyumbang untuk dunia pendidikan akan kami publish. Dengan tujuan transparansi dan motivasi bagi masyarakat lain.

Kekurangan ruang kelas juga dipengaruhi minat orangtua dalam menyekolahkan anaknya.

Jika orangtua cenderung ke sekolah negeri, bisa saja ruang kelas menjadi kurang.

Tentunya kami berharap masyarakat yang ekonomi menengah ke atas, kalau bisa melirik swasta yang

memang punya nama.

Jadi kebutuhan kursi di sekolah negeri ada tempat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang masuk dalam zonasi sekolah.

Ke depan Disdik harus membuat kajian dengan kebutuhan riil sarana pendidikan di Batam.

Jadi ada satu program yang mereka telaah, seperti di Batam ini dunia pendidikan yang kurang apa? Dengan itu kebutuhan sarana pendidikan dari tahun ke tahun akan terstruktur. Perencanaan harus dimaksimalkan lagi. (egw)

Tanjunguma Dibuat Berkonsep Pelangi

► Nuryanto Desak Legalitas Kampung Tua

BATAM, TRIBUN - Pengecatan kampung tua Tanjunguma yang berkonsep pelangi, menurut Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto merupakan hal positif. Hanya saja ia mengimbau agar Badan Pengusahaan (BP) Batam segera merealisasikan kampung tua di Kota Batam.

"Saya imbau cepat dan jangan ditunda-tunda lagi. Kapan legalitasnya dikeluarkan. Biar langsung dibuat perdanya. Biar ada kepastian karena sudah banyak yang mengadu ke tempat kita," ujar Nuryanto, Senin (23/4).

Ia mengaku telah koordi-

nasikan dengan BP Batam untuk segera melegitimasi seluruh kampung tua di Kota Batam. Berdasarkan data ada 34 sampai 37 kampung tua. Legalitas ini dilakukan agar melekat kepemilikannya kepada masyarakat langsung.

"Soal Kampung tua inikan sudah disepakati bersama dengan Pemko, BP Batam dan DPRD, kita juga sudah menganggarkan. Dimana kampung tua itu sudah menjadi tanggung jawab Pemko," tuturnya.

Nuryanto yang sering disapa Cak Nur ini menyebutkan infrastrukturnya, harus

dibuat dan ini kewenangan Pemko Batam. Tetapi sampai sejauh mana legalitasnya. "Kalau legalitasnya sudah jelas tentu Pemko wajib membuat infrastrukturnya," jelasnya.

Infrastrukturnya harus dirancang dan direncanakan. Jadi nuansa historis kampung tua inikan berupa sejarah. Dan harus ditampilkan dan menjadi destinasi wisata di Kota Batam.

"Saat ini DPRD sedang mempersiapkan perda kampung tuanya. Selama inikan hanya peraturan wali kota saja," katanya. (rus)

Gustian Tutup 15 Warnet di Batuaji

► Tidak Berizin dan Menyalahi Aturan



TRIBUN/IST

BATAM, TRIBUN - Masyarakat Batuaji dan Sagulung, keluhkan banyaknya warung internet yang beroperasi tidak sesuai ketentuan yang diberikan pemerintah Kota Batam. Sebab Warnet masih banyak yang buka sampai larut malam.

Bahkan di beberapa tempat seperti di daerah ruko Pendawa, ruko Taman Lestari, dan di Tanjungcang. Begitu juga dengan daerah Sagulung, banyak warnet yang buka sampai larut malam bahkan ada juga yang sampai pagi hari.

Keluhan masyarakat dari Batuaji dan Sagulung tersebut juga sudah sampai ke telinga kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP) Kota Batam Gustian Riau.

Gustian mengatakan dalam satu bulan belakangan pihaknya sudah melaku-

kukan penutupan terhadap 15 warnet yang beroperasi tanpa izin di Batuaji.

Berdasarkan keluhan warga atau laporan pihak kecamatan, warnet-warnet yang ditertibkan itu kerap beroperasi hingga larut malam bahkan 24 jam nonstop. Padahal dalam aturan warnet hanya boleh beroperasi hingga pukul 22.00 WIB. "Tidak itu saja mereka (pemilik warnet) juga sering menerima pengunjung anak sekolah di jam sekolah. Itu tak boleh," kata Gustian.

Selain wilayah Kecamatan Batuaji, sambung Gustian, pihaknya juga akan menertibkan warnet lain yang ada di Sagulung. Persoalannya sama, warnet di sana umumnya tak mengantongi izin yang lengkap dan kerap dikeluhkan masyarakat. "Penertiban di Sagulung da-

lam waktu dekat ini kami turun. Semua akan ditertibkan," kata Gustian.

Di tempat terpisah Camat Batuaji, Ridwan mendukung penutupan warnet-warnet yang beroperasi tanpa izin di Batuaji. Warnet-warnet tersebut sering dirazia selama ini oleh pihak kecamatan namun tetap beroperasi. "Hampir semua warnet di Batuaji tidak memiliki izin, kami sudah sering peringati tapi tetap saja membandel. Baguslah kalau tutup karena memang itu wewenang BPM PTSP," kata Ridwan.

Ridwan berharap agar penertiban itu dilakukan secara merata sebab masih banyak warnet lain yang beroperasi tanpa izin di Batuaji. "Sudah sampai ke perumahan. Semoga ditertibkan semuanya. Ini sering dikomplain masyarakat selama ini," kata Ridwan. (ian)